ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU NEGARA

Via Maidala Putri

Email : viamaidalaputri573@gmail.com

No BP: 2010003600083

Universitas Ekasakti-AAI Padang.

Fakultas Hukum

A. PENDAHULUAN

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat mengerjakan makalah ini yang berjudul “ Aliran-Aliran Dalam Ilmu Negara” Makalah ini adalah sebagai salah satu syarat memenuhi mata kuliah di Universitas Ekasakti Padang. Aliran bermakna sesuatu yang mengalir seperti air, hawa dan listrik serta saluran. Aliran berhubungan dengan pandangan, sikap dan haluan. Aliran ini dimasukkan kedalam beberapa bentuk yaitu : aliran politik, aliran filsafat dan aliran kepercayaan. Aliran itu seperti pilihan.

Ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Sebelum pembaca mempelajari lebih jauh hukum ketatanegaraan ada baiknya pembaca mengetahui tentang ilmu negara karena antara kedua mata kuliah saling berkaitan atau sama lainnya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu negara harus memenuhi 2 syarat pokok sebagai ilmu pengetahuan, yaitu :

1. Syarat Obyektif, bahwa kebenarannya harus dapat diterima umum.
2. Syarat Sistematis, dimana pengertian-pengertian yang diperolehnya tidak boleh bercerai berai melainkan merupakan satu kesatuan yang erat.

Unsur-unsur ideal ilmu pengetahuan dapat bersumber pada akal pikiran manusia atau pada perasaannya. Jika suatu bangunan hukum itu bersumber pada akal pikiran maka disebut sebagai pengertian-pengertian hukum. Dan jika bangunan hukum itu bersumber pada perasaan maka hukum itu disebut sebagai asas-asas hukum. Demikian pula dalam ilmu negara, dikenal adanya asas-asas dan pengertian-pengertian mengenai Negara dan Hukum Tata Negara. Pengertian-pengertian dalam ilmu negara pada umumnya bersifat tetap, sedangkan asasnya seringkali berubah-ubah. Perubahan-perubahan dalam asasnya disebabkan oleh pandangan hidup dan keduniaan dari masyarakat yang berbeda-beda. Jika ilmu hukum pada umumnya dapat dibagi dengan 2 lapangan besar yaitu hukum publik dan hukum privat. maka ilmu Negara akan mengantar kita untuk mempelajari hukum public khususnya ialah hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara. Aliran-aliran dalam Ilmu Negara adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan. Untuk menguraikan paham-paham dalam Ilmu Negara mesti dimulai dari paham yang paling kuno, yaitu paham jaman Yunani kuno.

Tujuan makalah :

Adapun tujuan penulis pembuatan makalah adalah :

1. untuk memenuhi salah satu nilai mata kuliah
2. agar Bisa menambah wawasan
3. agar bias saling sharing ilmu

Rumus masalah :

1. mengetahui pengertian dari aliran-aliran

2. mengetahui hal apa saja yang mencakup dalam aliran-aliran dalam ilmu Negara
3. aliran-aliran ilmu Negara menurut paham Yunani kuno

B. PEMBAHASAN

Aliran-aliran dalam Ilmu Negara adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan. Untuk menguraikan paham-paham dalam Ilmu Negara mesti dimulai dari paham yang paling kuno, yaitu paham jaman Yunani Kuno.

Aliran-aliran dalam Ilmu Negara menurut pendapat para filsuf jaman Yunani Kuno :

1. Aliran Calvinis

Aliran Calvinis memiliki paham yang sama dengan golongan katolik. Aliran ini mendasarkan ajarannya pada kedaulatan Tuhan dan mengembalikan semua kekuasaan kepada Tuhan, hanya bedanya dengan golongan katolik yaitu aliran ini tidak mengakui gereja sebagai perantara dari Tuhan dan juga tidak mengakui kekuasaan Paus. Kekuasaan negara adalah langsung berdasarkan kekuatan Tuhan sedangkan menurut ajaran golongan katolik, kekuasaan negara secara tidak langsung didapat dari Tuhan melalui manusia dengan budinya yang berasal dari Tuhan. Menurut golongan Calvinis kekuasaan negara merupakan pemberian dari Tuhan yang dipegang oleh Raja. Oleh karena itu negara yang menganut pahamnya, pengumuman mengenai undang-undangnya senantiasa didahului dengan kalimat atas karuni Tuhan. Sama halnya dengan katolik, golongan Calvinis juga beranggapan negara tidak bisa campur tangan terhadap golongan yang ada pada

masyarakat seperti keluarga, perusahaan dan sebagainya. Asasnya yang terkenal adalah kedaulatannya didalam lingkungannya sendiri yang berarti bahwa mereka bebas dalam menyalenggarakan kepentingannya sendiri tanpa di campuri oleh Negara.

2. Hegel

Hegel terkenal dalam ilmu pengetahuan karena filsafatnya, namun didalam ajaran itu ia menyinggung tentang negara. Dalam filsafatnya untuk mencari kebenaran ia memiliki sebuah metode yang penting yang disebut dialektika yaitu suatu metode dengan mengemukakan thesis yang kemudian disangkal dengan antithesis. Hasil dari perlawanan ini diperoleh synthesis yang merupakan kesimpulan dialektesis dan tersusun dari kedua unsur yang berlawanan itu. Negara merupakan kesimpulan dari 2 unsur yang berlainan, keterangannya sebagai berikut: Manusia adalah warga dalam masyarakat dan dalam sifat perorangannya ia ingin mendahulukan kepentingannya sendiri sebagai tujuan utama. Kemudian individu-individu itu membentuk masyarakat yang belum teratur karena belum ada badan yang mengatur kedua unsur tersebut yang kemudian dinamakan negara sebagai perwujudannya. Karena negara merupakan perwujudan cita-cita manusia yang mutlak maka negara adalah satu-satunya badan yang paling sempurna dimasyarakat yang paling sempurna dan harus dijunjung tinggi. Ajaran Hegel yang mutlak tersebut disebut sebagai absolut idealisme. Akibat ajaran ini timbullah anggapan bahwa negara harus didewakan dan menyebabkan paham tentang kedaulatan negara yang beranggapan bahwa semua kekuasaan bersumber pada negara. Ajaran ini mempengaruhi aliran Deutsche Publizisten Schule yang juga mendukung paham kedaulatan negara jerman dengan Karl Marx mempergunakan metode dialektika.

3. Karl Marx

Pada mulanya Karl Marx setuju dengan pendapat Hegel bahwa negara itu merupakan perwujudan dari Stittichkeit und Vermunt namun pada tahun 1844 ia meninggalkan ajaran tersebut. Marx tidak membenarkan pendapat Hegel yang melihat negara dari sudut alam citacita tetapi ia melihat hubungan masyarakat sebagai suatu kenyataan. Menurutnya dasar menentukan negara ialah negara kelas. Ajarannya tentang ilmu negara terdapat pada bukunya yang berjudul Das Komunistische Manifest pada tahun 1848. Menurut Marx negara akan tetap ada sebagai organisasi akibat dari suatu penjelmaan dari sejarah dan sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri jika kemajuana-kemajuan dalam prosese produksi dan pembagian kerja terdapat dan selama hak milik memegang peranan yang penting. Ajaran Marx disebut sosialisme ilmiah yaitu suatu sosialisme yang telah memperoleh penilaian sebagai ilmu pengetahuan karena ajarannya mengandung kebenaran bagi kaum komunis. Pendapat Marx selanjutnya “adalah suatu keharusan dari perkembangan sejarah manusia bahwa masyarakat akan menuju kearah sosialisme yang dipimpin oleh dictator proletar” Beberapa cendikiawan sosialisme sebelum Marx:

- a. Robert Owen (1771 – 1858) di Inggris
- b. Saint Simon (1760 – 1825) di Prancis
- c. Fourier (1772 – 1837) di Prancis

4. Robert Owen

Seorang pengusaha dan menganggap bahwa tenaga produktif manusia pada waktu itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menghasilkan kemakmuran,

juga segi moral dari masyarakat itu tidak dibina dengan baik sehingga akibatnya mendatangkan kemiskinan dan dosa.

5. Saint Simon

Seorang bangsawan di Perancis dan merasa tidak puas dengan hasil Revolusi Prancis, karena hasilnya dinikmati oleh golongan bangsawan saja yang mempunyai ciri golongan kapitalis. Dalam pendapatnya yang unik, ia membedakan dua golongan yang bekerja dan golongan yang malas. Golongan yang malas akan menderita kekalahan karena kehilangan kewibawaan sedangkan golongan orang yang tidak berada, tidak mampu memimpin masyarakat baik dalam kerohaniannya maupun dalam bidang politik. Menurut politik ditentukan oleh perekonomian rakyatnya baik dalam perusahaan administrasinya maupun dalam produksinya, sehingga kekuasaan politik aras golongan lain harus dirubah dan akhirnya negara akan hilang.

6. Fourier

Seorang kritikus dan seorang satiris. Menurut pendapatnya didalam masyarakat kapitalis terdapat penumpukan modal yang besar, yang dipeloh dari penderitaan dan kemiskinan dari pihak lain. Kemiskinan akan membawa bencana yang besar terhadap moral manusia sehingga hilanglah kepribadian dari manusia itu. Selanjutnya ia berpendapat dengan makin meningkatnya produksi sebagai hasil ciptaan manusia dapat dipenuhi sehingga keadilan sosial bisa dicapai. Kembali kepada ajaran Marx. Marx dalam menerangkan perubahan sosial (masyarakat) mempergunakan metode dialektika dari Hegel dengan memutar balikkan teori Hegel yaitu kalau Hegel berpendapat bahwa cita-cita manusia yang

menentukan kenyataan, maka Marx justru sebaliknya kenyataanlah yang menentukan kesadaran manusia. Menurutnya susunan masyarakat timbul terutama ditentukan oleh kehidupan masyarakat itu sendiri.

7. Bakunin

Dalam waktu yang kira-kira sama muncul suatu pendapat yang berbeda dengan faham Marx walaupun pada titik penghabisannya adalah sama. Bakunin yang hidup pada tahun 1814 – 1876 memiliki faham lebih radikal dari Marx. Ia menghendaki hilangnya negara dimuka bumi karena negara merupakan suatu penyakit bagi masyarakat. Karena adanya negara maka timbullah penindasan dan senantiasa merupakan alat bagi yang berkuasa untuk menindas golongan lain yang dikuasainya. Karena itu negara harus dilenyapkan dari muka bumi dan sebagai gantinya dibentuk perserikatan-perserikatan individu yang bebas dari segala macam tekanan. Apakah akibat dari faham Bakunin ini? Akibatnya ialah akan timbul kekacauan - kekacauan di dalam masyarakat yang mempunyai negara. Kalau dilihat dari sudut tata tertib dimana negara sangat diperlukan, pendapat Bakunin ini justru menghendaki kekuasaan diatasnya dan disebut anarkhisme. Faham ini tidak banyak pengikutnya dan buktinya hingga sekarang masyarakat masih mengakui perlu adanya negara. Faham ini juga tidak mengikuti sejarah manusia dan ilmu negara ia tidak mendapat tempat yang subur.

C. penutup

Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Aliran-aliran dalam Ilmu Negara adalah paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan. Aliran-aliran dalam Ilmu Negara

diungkap menurut beberapa pendapat para filsuf jaman Yunani Kuno diantaranya: Aliran Calvinis, Hegel, Karl Marx, Robert Owen, Saint Simon, Fourier, Bakunin.

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Lex Jurnalica, Volume 13, Nomor 3, 2016.

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PerundangUndangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Idelogi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.